



**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA**

NOMOR SOP	W.25-OT.02.02-1880
TANGGAL PEMBUATAN	03 Februari 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	03 Mei 2025
DISAHKAN OLEH 	KEPALA KANTOR WILAYAH  Ditandatangani secara elektronik oleh : KURNIAMAN TELAUMBANUA NIP. 197501132001121001
NAMA SOP	PELAKSANAAN ANALISA KEBUTUHAN ANGGARAN
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-05.PR.01.04 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan;9. Permenkum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);10. Permenkum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik3. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pengendalian dan Evaluasi4. Mengetahui dan memahami aplikasi RKA-K/L
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengusulan Postur Anggaran	<ol style="list-style-type: none">1. Jaringan Internet2. Komputer/Printer/Scanner3. Alat Komunikasi4. Ruang Rapat
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:
Apabila SOP Ini Tidak Dilaksanakan Maka Pelaksanaan Analisa Kebutuhan Anggaran Akan Terhambat.	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

PELAKSANAAN ANALISA KEBUTUHAN ANGGARAN

No.	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		KAKANWIL	KABAG TUU	KOORDI NATOR	JFT/JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan untuk mempersiapkan data-data analisa kebutuhan anggaran dari seluruh Satuan Kerja UPT dan Divisi di Kantor Wilayah					Surat Sekretaris Jenderal Tentang Penyusunan Usulan Analisa Kebutuhan Anggaran	5 Menit	Surat disposisi	
2.	Memberikan disposisi kepada Koordinator untuk mempersiapkan data-data analisa kebutuhan anggaran dari seluruh Satuan Kerja UPT dan Divisi di Kantor Wilayah					Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	5 Menit	Surat disposisi	
3.	Menginformasikan Arahan untuk mempersiapkan data-data analisa Postur Anggaran dari seluruh Satuan Kerja UPT dan Divisi di Kantor Wilayah					Surat yang telah Disposisi oleh Kabag TUU	5 Menit	Surat disposisi	
4.	Mengumpulkan data/bahan laporan, menyusun laporan dalam bentuk data-data analisa kebutuhan anggaran dari seluruh Satuan Kerja UPT dan Divisi di Kantor Wilayah untuk dilaporkan kepada atasan					1. Surat Pengumpulan Bahan Usulan Penyusunan RKA-KL Analisa Kebutuhan Anggaran. 2. Data Dukung Usulan Analisa Kebutuhan Anggaran	3 Hari	1. Konsep Surat Pengumpulan Bahan Usulan Penyusunan RKA-KL Analisa Kebutuhan Anggaran. 2. Data Dukung Usulan Analisa Kebutuhan Anggaran	
5.	Mengoreksi hasil akhir laporan data-data analisa kebutuhan anggaran dari seluruh Satuan Kerja UPT dan Divisi di Kantor Wilayah dan mengirimkannya kepada Kabag TUU					Data Dukung Usulan Analisa Kebutuhan Anggaran	2 Hari	Data Dukung Usulan Analisa Kebutuhan Anggaran	
6.	Mengoreksi hasil akhir laporan data-data analisa kebutuhan anggaran seluruh Satuan Kerja UPT dan Divisi di Kantor Wilayah dan mengirimkannya kepada Kakanwil					Data Dukung Usulan Analisa Kebutuhan Anggaran	1 Hari	Data Dukung Usulan Analisa Kebutuhan Anggaran	
7.	Menyetujui hasil akhir laporan data-data analisa kebutuhan anggaran dan memerintahkan untuk dilakukan pengiriman hasil usulan Postur Anggaran seluruh Satuan Kerja UPT dan Divisi di Kantor Wilayah via Email dan Sisumaker					Data Dukung Usulan Analisa Kebutuhan Anggaran yang Telah Disetujui	5 Menit	Data Dukung Usulan Analisa Kebutuhan Anggaran yang Telah Disetujui	

